

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izinNya jualah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 selesai disusun untuk memenuhi kewajiban Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 tentang Percepatan Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 kepada Pengguna Anggaran untuk mempertanggung jawabkan atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan, serta mengukur keberhasilan kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Harapan kami dengan tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini, kiranya dapat digunakan oleh semua pihak yang berkompeten untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada tahun 2020 telah meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Dr. Ir. Roni Dwi Susanto.,M.Si pada bulan November 2020 sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Terbaik Tingkat Nasional dan mendapatkan Piagam Anugerah Pengadaan 2023 dengan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Peringkat Terbaik yang diserahkan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M serta menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sangat disadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip



transparansi, efisiensi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini akan diterima dan semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama.

Banjarbaru, Januari 2025

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,

Dr. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si
NIP 19740310 199903 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok.....	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis SKPD	10
E. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja.....	18
1. Eselon II	19
2. Eselon III	19
3. Eselon IV	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	13
1. Sasaran RPJMD	24
2. Membandingkan Realisasi Kinerja & Target Kinerja.....	25
1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	32
2).Realisasi Kinerja dan Target Kinerja serta Capaian Kinerja.....	35
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Capaian Kinerja beberapa tahun sebelumnya.....	39
4) Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per eselon tahun 2024.....	40
B. Akuntabilitas Keuangan.....	41
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	44
2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan Program	
BAB IV PENUTUP	46
A. Simpulan	46
B. Strategi Peningkatan Kinerja	48
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Foto/Gambar Kegiatan	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan	8
Tabel 1.4 Program dan Kegiatan Biro Pengadaan barang dan jasa Tahun 2024....	17
Tabel 1.5 Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Tahun 2024	19
Tabel 1.6 Penghitungan Pencapaian Kinerja	24
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	24
Tabel 1.8 Realisasi Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 1.9 Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Serta Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	32
Tabel 2.0 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	35
Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa	39
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	39
Tabel 2.3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	40
Tabel 2.4 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40
Tabel 2.5 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	41
Tabel 2.6 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	41
Tabel 2.7 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	42
Tabel 2.8 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	42
Tabel 2.9 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	43
Tabel 3.0 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian	



Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	43
Tabel 3.1 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian	
Pembinaan Tata Usaha Pengadaan Barang dan Jasa	44
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian	
Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	44
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kepala Sub.Bagian	
Pendampingan, Konsultasu dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	45
Tabel 3.4 Rincian Anggaran Berdasarkan Sasaran Pada Biro Pengadaan	
Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 3.5 Rincian Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan Pada Tahun	
Berjalan dan Tahun Sebelumnya	50
Tabel 3.6 Program Biro Pengadaan Barang dan Jasa	53



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 Tentang Percepatan Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance* menuntut dua hal, yaitu :

1. Kemampuan untuk menjawab dalam hubungannya dengan tuntutan yang diberikan oleh para aparatur pemerintah dengan menjawab secara periodik terkait dalam penggunaan kewenangannya, sumber daya dan capaian dari penggunaan sumber daya tersebut.
2. Dalam Pelaksanaan Kewenangan yang telah diberikan maka ada pertanggungjawaban kepada pemberi amanah dengan mekanisme pertanggungjawaban.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang transparasi, efesiensi, dan akuntabilitas sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.



B. Dasar Hukum Pembentukan Dan Tugas Pokok

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023¹ Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum pengembangan pengadaan barang dan jasa.
2. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
3. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk melaksanakan tugas maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.



2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan.

❖ Biro Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengelola strategis pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system pengadaan secara elektronik, pengembangan system informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja bagian.
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian.



- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Biro.
 - e. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bagian.
 - f. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Biro.
 - g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil elektronik.
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ.
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa.
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro.
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pembinaan , Tata Usaha, Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan dan Pendampingan, Konsultasi dan / atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan administrasi pada tata usaha, pembinaan sumberdaya manusia, pembinaan kelembagaan dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi pelayanan administrasi pada tata usaha biro pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi pembinaan sumberdaya manusia pengadaan barang dan jasa dan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

Tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas pokok yaitu Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Pembinaan dan advokasi,



Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari adalah :

- a. Merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Strategi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan meliputi pengendalian, perumusan kebijakan administratif, mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, layanan pengadaan secara elektronik serta bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Struktur Organisasi

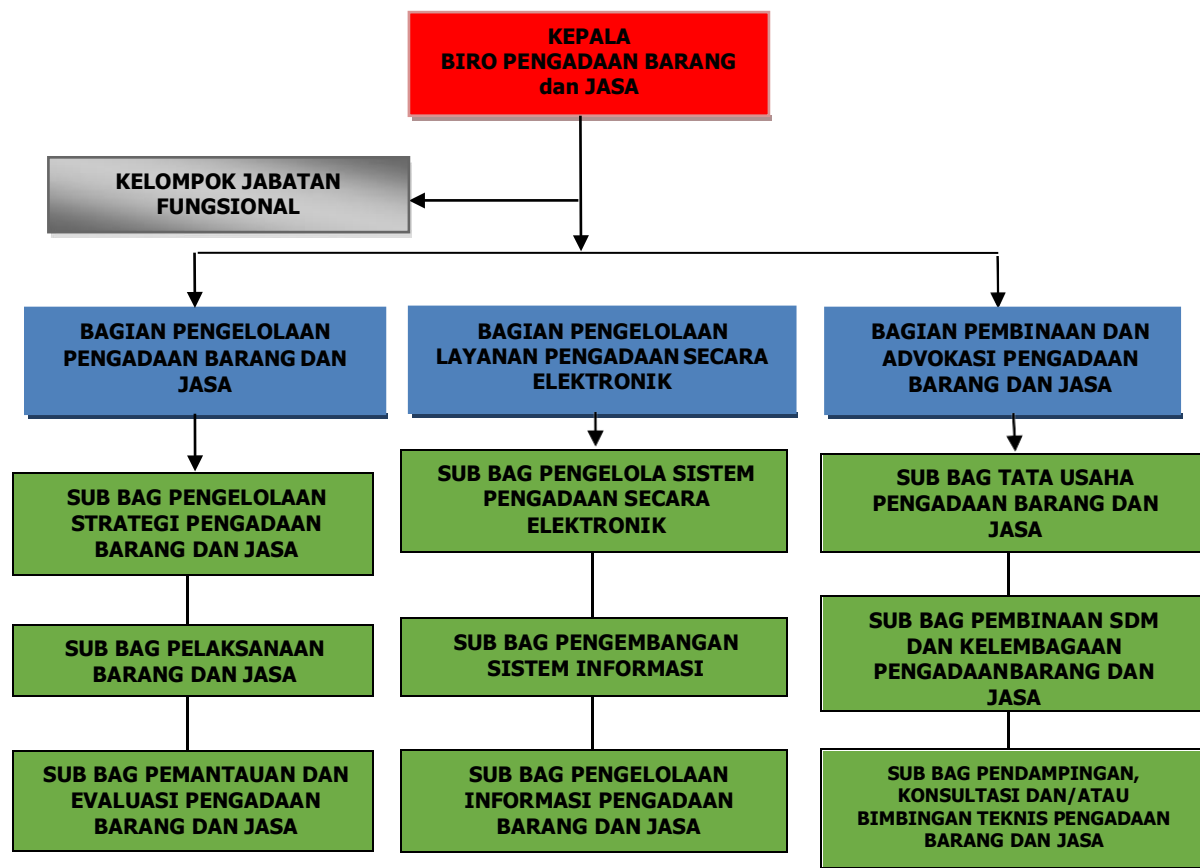
1. Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa



Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kemampuan yang handal sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi sumber daya manusia yang dimiliki Biro Pengadaan Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebanyak 52 (Lima puluh dua) orang pegawai dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan golongan/ruang sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai	(%)
1.	Doktor (S.3)	1	1.92%
2.	Pasca Sarjana (S.2)	13	25%
3.	Sarjana (S.1)	36	69.23%
4.	Diploma IV	-	-
5.	Diploma III	1	1.92%
6.	Diploma II	-	-
7.	Diploma I	-	-
8.	SLTA (sederajat)	1	1.92%
9.	SLTP (sederajat)	-	-
10.	SD (sederajat)	-	-
Jumlah		52	100%

Dari tingkat pendidikan, maka pegawai dengan tingkat pendidikan S.3 sebanyak jumlah 1 (satu) orang atau 1.92% (Satu koma Sembilan puluh dua persen), pendidikan S.2 jumlah sebanyak yaitu 13 (tiga belas) orang atau 25% (Dua puluh lima persen), S.1 menempati jumlah terbanyak yaitu 36 (Tiga puluh enam) orang atau 69.23% (Enam puluh sembilan koma dua puluh tiga persen), Diploma III sebanyak jumlah 1 (satu) orang atau 1.92% (Satu koma Sembilan puluh dua persen), pendidikan SLTA (sederajat) sebanyak yaitu 1 (satu) orang atau 1.92% (Satu koma Sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Berdasarkan Jabatan

Susunan pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari 12 orang Pejabat Struktural, 31 orang Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, 4 orang Fungsional Pranata Komputer dan 5 orang Fungsional Umum seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian Jabatan	Jumlah	(%)
1.	Struktural (Eselon II, III & IV)	12	23.07%
2.	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	31	59.62%
3.	Fungsional Pranata Komputer	4	7.69%
4.	Fungsional Umum/Pelaksana	5	9.62%
Jumlah		52	100%

c. Berdasarkan Golongan/Kepangkatan



Susunan pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan/Kepangkatan & Jabatan	Jumlah	(%)
1.	IV/c Kepala Biro	1	1.92%
2.	IV/b Kepala Bagian/Fungsional	3	5.77%
3.	IV/a Kepala SubBagian/Fungsional	7	13.46%
4.	III/d Kepala Sub Bagian/Fungsional /Pelaksana	14	26.92%
5.	III/c Kepala Sub Bagian/Fungsional /Pelaksana	8	15.38%
6.	III/b Fungsional/Pelaksana	8	15.38%
7.	III/a Fungsional	1	1.92%
8.	II/d	0	0
9.	II/c Pelaksana	1	1.92%
10.	II/b	0	0
11.	II/a	0	0
12.	IX Fungsional (PPPK)	9	17.31%
Jumlah		52	100

Ditinjau berdasarkan golongan, maka jumlah pegawai terbanyak adalah pada golongan III sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang atau 59.62% (Lima puluh Sembilan koma enam puluh dua persen) persendari seluruh pegawai.

➤ DATA IP ASN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Jumlah
1	DR. Rahmaddin MY, A.Ks,M.Si	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	25	40	30	5	100
2	Drs. Khairil Anwar, MM	Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	23	30	30	5	88
3	Masrani Noor, SE	Kabag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20	13	30	5	68
4	Fahruraji, SE, MT	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi PBJ	23	25	30	5	83
5	M. Ari Wibowo Sariman, ST	Kasubag Pengelolaan Startegi Pengadaan Barang dan Jasa	21	10	25	5	61



D. Isu Strategis SKPD

Analisis Gambaran Umum Terkait Dengan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

- 1. Analisis Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan (Strength)
 - 1) Struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2024 dengan 2 Program, 9 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan;
 - 3) Sarana dan prasarana unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan pada tahun 2024 ini sudah tercatat dan diinventarisir dengan baik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan sarananya antara lain peralatan kantor mendukung program kerja dan kegiatan kerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - 4) Proses Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD Lingkup Pemprov Kalselyang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d Desember) TA. 2024 ini, dengan data/paket pengadaan yang sudah masuk dan dikoordinir oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- Tender

Jumlah paket tender terdapat 245 paket dengan pagu anggaran Rp.365.784.410.000,- serta realisasi anggaran Rp.341.455.095.014.

Jenis	RUP	REALISASI TENDER
Tender	19	14
Seleksi	253	231
Tender Cepat	0	0
Total	272	245

-Non Tender



Jumlah paket tender terdapat 1.074 paket dengan pagu anggaran Rp.175.843.682.143,- serta realisasi anggaran Rp.121.847.320.795.

Jenis	RUP	REALISASI NON TENDER
Pengadaan Langsung	2.778	1.051
Penunjukan Langsung	110	23
Total	2.888	1.074

- b. Kelemahan (Weakness)
- 1) Memiliki dua kantor yang terpisah pada 2 tempat yaitu di Banjarmasin dan Banjarbaru menyulitkan optimalisasi kegiatan dan peningkatan kualitas pelayanan, Kantor di Banjarbaru bergabung dengan Biro yang lain sehingga pelayanan kurang optimal terutama tidak adanya jaringan telekomunikasi seluler yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2) Adanya keterbatasan ruang kerja dan sarana prasarana peralatan kantor bagi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa karena penambahan jumlah personil Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada awal tahun 2024. Serta kemampuan/kompetensi SDM terutama Jabatan Fungsional belum merata dan kurangnya SDM untuk Staf ASN/Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.



2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- 1) Diklat dan Bimtek bagi pegawai/aparatur, dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai/aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informatika/informasi yang sangat mendukung mobilitas pelaksanaan pekerjaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, seperti perkembangan komputerisasi, internet dan media sosial yang akan membuat pekerjaan lebih mudah diolah dan dikerjakan; dan
- 3) Peraturan pelaksanaan yang dibuat/ diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, dengan adanya peraturan yang akan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah terutama tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Tantangan/Ancaman

- 1) Adanya regulasi pengadaan barang dan jasa yang selalu berubah-ubah
- 2) Koordinasi dari aparat penegak hukum yang lemah

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2024, disertai dengan uraian keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam capaian kinerja (performance result) yang diukur dengan cara analisis gap, yaitu membandingkan Penetapan Kinerja dengan Realisasi sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan organisasi.



Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

indiriuraikan dalam bentuk per bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu Strategis SKPD
- E. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa).
3. Eselon III (Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 3) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa)
4. Eselon III (Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PengadaanBarang dan Jasa)
 - 1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM PengadaanBarang dan Jasa)
 - 2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa)
 - 3) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, danBimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa)
5. Eselon III (Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
 - 1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik)



2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi)

3) Eselon IV (Kepala Sub Pengelolaan Informasi Pengadaan
Barang/Jasa)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 Bab

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RENSTRA Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, menunjukkan komitmen yang berisi Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan dalam menunjang pencapaian Visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **“KALSEL MAJU (KALIMANTAN SELATAN MAKMUR, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Fungsi RENSTRA adalah sebagai pedoman bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa serta layanan pengadaan secara elektronik, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam upaya mendukung Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyesuaikan dan menyelaraskan dengan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar sesuai dengan semua Program dan seluruh Kegiatan agar selaras dengan Misi Kepala Daerah dimaksud yang dirumuskan sebagai berikut : **MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG LEBIH FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK** Yang dijabarkan dalam Visi dan Misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

A.1. VISI & MISI

Misi menjabarkan lebih lanjut rumusan yang berisikan pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai Visi, yang mengacu kepada tugas pokok, fungsi dan



kewenangan yang telah diberikan. Visi dan Misi Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan yang baik.

Misi :

- 1. Meningkatkan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa**

A.2. TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tercemin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik Provinsi Kalimantan Selatan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan**

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi serta untuk menjawab pernyataan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan tujuan tersebut untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana saat ini beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

A.3. SASARAN



Dengan Sasaran sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**
- 2 Meningkatkan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa**
- 3 Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Barang dan Jasa**



A.4. PROGRAM

Untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran startegis, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan program yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan 2 (Dua) Program Utama sebagai berikut :

Atas Program Utama tersebut dikembangkan dan disusun kedalam 9 kegiatan dan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

15 sub kegiatan sebagai perencanaan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 1.4
Program dan Kegiatan Biro Pengadaan dan Jasa Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan Teknis
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa - Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 2. Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik - Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik - Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa - Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang



		dan Jasa - Pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa - Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa - Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa
--	--	--

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dari Program dan Kegiatan tersebut oleh masing-masing Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara dituangkan kedalam sebuah Perjanjian Kinerja antara :

1. Kepala Bagian dengan Kepala Biro/ Perjanjian Kinerja Eselon III; dan

2. Kepala Sub Bagian dengan Kepala Bagian/ Perjanjian Kinerja Eselon III dengan IV. Sebagaimana lampiran berikut :



Tabel 1.5
Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Biro Pengadaan Barang dan JasaTahun
2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	Predikat indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	85 Baik	Eselon II Kepala BiroPengadaan Barang/Jasa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah inovasi pelayanan publik pengadaan barang dan jasa	Jumlah inovasi	4	
		Nilai indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan barang dan jasa	Nilai	87	
2	Terwujudnya pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah	Persentase proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu	Persen	100	ESELON III Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	Persen	100	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	25	
3	Meningkatnya Kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan LPSE sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	100	ESELON III Kepala BagianPengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik
		Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yangdapat diselesaikan	Rasio	0,8	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan administrasi tata usaha biro	Persen	100	ESELON III Kepala Bagian Pembinaan



5	Meningkatnya kualitas Kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan Kualitas SDM Pengadaan	Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3	Persen	30	dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	Persen	66.67	
	Meningkatnya kualitas layanan konsultasi Pendampingan dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan Jasa	Persen	100	
6	Optimalnya Rencana Strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	Persentase paket PBJ perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi
		Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	Persen	100	
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi PBJ	Persen	100	
7	Terwujudnya pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase pengelolaan katalog lokal	Persen	55	
8	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Persentase perangkat daerah & unit kerja yang menyampaikan laporan PBJ sesuai ketentuan	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pemantauan & Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan	Persen	100	



8	Terselenggaranya jasa layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan menginput RUP serta diumumkan pada SIRUP tepat waktu	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		Persentase layanan konsultasi/ pendampingan terkait LPSE kepada SKPD/Unit Kerja/Penyedia/Pokja di lingkup Pemerintah Prov.Kalsel	Persen	100	
9	Optimalnya pengembangan sistem pendukung informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	Aplikasi /konten	4	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi
10	Optimalnya penyebarluasan informasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pelayanan informasi PBJ pemerintah Masyarakat yang mengakses melalui web resmi LPSE Prov.Kalsel	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang Jasa
		Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	Persen	100	
11	Terpenuhinya pelayanan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset dan umum	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa



12	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Optimalnya pembinaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	Persentase SDM ASN selaku Pengelola PBJ yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	Persen	80	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
		persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Prov/Kab/Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)	Persen	60	
		Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi/kab/kota	Persen	100	
13	Terlaksananya pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis proses pengadaan barang dan jasa	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan	Persen	100	ESELON IV Kepala Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik)	Persen	65	
		Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	Persen	100	



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program dan kegiatan.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi adalah kegiatan membandingkan tingkat Capaian kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 tergambar dari capaian 2 Program dan 9 Kegiatan dan 15 sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026, Penetapan Kinerja Tahun 2024, Rencana Kerja Tahun 2024, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.



Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 6 kategori sebagai berikut :

Tabel 1.6

Penghitungan Pencapaian Kinerja

Nilai	Rentang Pencapaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % s.d 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % s.d 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % s.d 70 %	Baik
V	Diatas 50 % s.d 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

1. Sasaran RPJMD

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur Kalimantan Selatan yang diemban oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7

Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
1.	Predikat indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	85 (baik)	93.75	110.29
2	Jumlah inovasi pelayanan publik pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadaan barang dan jasa	4 Inovasi	4 Inovasi	100
3	Nilai indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan barang dan jasa		87 (Sangat Memuaskan)	99.70 (Sangat memuaskan)	114.59
Rata-Rata Capaian					108.29



Tabel 1.8

Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dibandingkan dengan Capian Regional Kalimantan dan Nasional

INDIKATOR	PERBANDINGAN						REALISASI NASIONAL
	KALSEL	KALTENG	KALBAR	KALTIM	KALTARA	TARGET NASIONAL	
Predikat indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	93.75 Sangat baik	79.33 baik	82.50 baik	86.69 baik	89.22 baik	Minimal Baik >70 sd 90	Kementerian Dalam Negeri (93.65) Kemenpan RB (81.09) LKPP RI (90.02)

- KETERANGAN :

Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai aspek indikator “antara” dalam indeks reformasi birokrasi, maka dalam penilaian indeks tata Kelola pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indicator yang mengukur tata Kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup :

- 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari :
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) : Bobot 10%
 - b. e- Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) : Bobot 5%
 - c. e-Purchasing (Toko Daring) : Bobot e-katalog 4% dan Bobot Toko Daring 1%
 - d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing : Bobot 5%
 - e. e-Kontrak : Bobot 5%
 - 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) : Bobot 30%
 - 3. Tingkat Kematangan UKPBJ : Bobot 40%
 - 4. Predikat ITKP :
 - a. Istimewa : 100
 - b. Sangat Baik : >90 sd <100
 - c. Baik : >70 sd 90
 - d. Cukup : ≥50 sd 70
 - e. <50 : Kurang
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan Skor ITKP 93.75 Predikat Sangat Baik. Rincian nilai ITKP Kalsel sebagai berikut :
- 1. SiRUP : Persentase 100% dengan Bobot 10%
 - 2. e-Katalog : Persentase 94.60% dengan Bobot 3.78%
 - 3. Non e-Tendering/Non e-Purchasing : Persentase 33.23% dengan Bobot 0%
 - 4. e-Tendering : Persentase 98.60% dengan Bobot 4.93%
 - 5. Toko Daring : Persentase 100% dengan Bobot 1%
 - 6. e-Kontrak : Persentase 80.81% dengan Bobot 4.04%
 - 7. Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ : Bobot 30%
 - 8. Tingkat Kematangan UKPBJ : Bobot 40%



Realisasi Kinerja dan Target Kinerja yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.9
REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	Indikator	Realisasi Kinerja					Target Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan internet	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bakar minyak	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Peningkatan dan Pembenahan Administrasi Tata Usaha Biro	Meningkatnya Perencanaan Program Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Pelaporan dan Pencatatan Aset.	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
Pengadaan Kendaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemprov Kalsel	Persentase Lahan yang bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov.Kalsel	Tepeliharanya Barang Daerah Lingkup Setda Prov.Kalsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan DKBMD dan DKPBMD	Tersedianya Buku standar Harga Barang & Buku DKMBD, DKPBMD, RKBMD dan RKPBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Pengadaan	Terselesaikannya proses pengadaan secara online	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpelihara & mem per panjang masa pakai sarpras & terpenuhinya biaya operasional AMKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan LPSE	Keamanan informasi pengadaan barang dan jasa dan SiRUP SKPD, Server, Storage, Komputer, Notebook, Tablet, Printer, kelengkapan komputer, jaringan dan CCTV.	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LAYAN AN PUBLIK											
Peningkatan Penatausahaan Perlengkapan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian	Meningkatya proses penatausahaan perlengkapan, keuangan, aset dan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN BARANG MILIK DAERAH											
Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel	Tersimpan dan Terdistribusinya barang bergerak dan barang tidak bergerak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Layanan Pengadaan	Terselesaikannya proses pengadaan secara online/ elektronik	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov Kalsel	Sarana dan Prasarana terpelihara dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

Ganti Rugi Tanah dan Pensertifikatan Tanah/ Milik Pemprov Kalsel	Persentase Lahan yang bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemprov Kalsel	Terpenuhinya sarpras penunjang kerja Aparatur/ PNS Pemprov Kalsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kerja Unit Layanan Pengadaan	Persentase kegiatan penyusunan Pokja layanan pengadaan Barang/jasa	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pembuatan buku DKBMD, DKPBMD,RKBMD, DKBMD,DKBMD-P Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah buku DKBMD, DKBPBMD, RKBMD, RKBMD, RKBMD&DKBMD-P& DKPBMD-P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah buku laporan realisasi pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa.	Tersusunnya Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa.	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
PROGRAM KEBIJAKANDAN PELAYANAN PENGADAAN BARANGDAN JASA											
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	-	61.59%	59.91	69.98%	-	-	25%	25%	25%
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase paket PBJ perangkat daerah yang efektif dan efisien	312 paket	100%	100%	100%	100%	400 paket	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	1 dok	100%	100%	100%	100%	1 dok	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi PBJ	40 skpd	100%	100%	100%	100%	49 perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase pengelolaan katalog lokal	-	-	-	50%	55%	-	-	-	50%	55%
Pemantau dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan PBJ sesuai aturan	100%	100%	100%	82.20%	93.88%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan	12 dok	100%	100%	93.87%	93.51%	12 dok	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu	288 paket	169%	100%	100%	100%	345 paket	100%	100%	100%	100%
	2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1. Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput serta diumumkan pada SIRUP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/Unit kerja/penyedia/pokja di lingkup pemerintah provinsi kalsel	-	-	126.60%	100.10 %	100%	-	-	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	1 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	4 aplikasi/konten	1 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	3 aplikasi/konten	4 aplikasi/konten
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase peningkatan pengguna/pemakai yang mengakses informasi pada website resmi LPSE prov.Kalsel	70.65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
Pembinaan dan Advokasi PenngadaanBarang dan Jasa	1. Persentase pelayanan administrasi tata usaha biro	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	2. Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten	85%	47%	86.67%	97.56%	90.57%	75%	47%	50%	57.14%	66.67%
	3. Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3	7%	0%	21.43%	45.45%	54.55%	23%	17%	17%	18.18%	30%
	4. Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tata Usaha	1. Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset dan umum	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
Pembinaan Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ prov/kab/kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)	100%	30%	21.43%	45.45%	81.82%	100%	30%	35%	40%	60%
	2. Persentase SDM ASN selaku pengelola PBJ yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	11 org	100%	86.67%	97.56%	84.91%	4 org	100%	50%	70%	80%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	3. Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan PBJ prov/kab/kota	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis	1. Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik)	105 peserta	53.66%	57%	60%	68%	80 peserta	50%	55%	60%	65%
	3. Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti. Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan, Perangkat daerah	-	-	-	2 dok	6 dok	-	-	12 dok	2 dok	6 dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1. Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	-	1 dok	12 dok	6 dok	-	-	1 dok	12 dok	6 dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	116 stell	120 stell	248 stell	-	-	116 stell	120 stell	240 stell



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

Administrasi Perangkat Daerah											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	100%	752 L	-	-	100 %	100%	752 L	-
Penatausaahn Arsip Dinamis Pada SKPD	1. Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dok	3 Dok	3 Dok	12 dok	12 dok	-	3 Dok	3 Dok	12 dok	12 dok
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	100%	100%	33 unit	43 unit	-	100 %	100%	33 unit	43 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	12 bulan	12 laporan	-	100 %	100%	12 bulan	12 laporan



Tabel 2.0
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Biro Pengadaan Barangdan Jasa Th.2024

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
I	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Persentase proses PBJ Prov.Kalsel yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu 2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan evaluasi bebas mark up 3. Rasio nilai belanja yang di lakukan melalui pengadaan	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
		25%	69.98%	69.98%
2	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 1. Persentase paket pengadaan barang dan jasa perangkat daerah yang efektif dan efisien 2. Persentase hasil riset analisa pasar yang digunakan oleh pengguna pengadaan barang dan jasa 3. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
		100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	100%	100%	100%
	2. Persentase pengelolaan katalog lokal	55%	55%	55%
4	Pemantau dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 1. Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan PBJ sesuai aturan 2. Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan	100%	93.88	93.88
		100%	93.51	93.51
5	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan 2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
		Rasio 0,8	Rasio 0,8	Rasio 0,8
6	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1. Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu 2. Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/Unit kerja/Penyedia dilingkup Pemprov.Kalsel	100%	100%	100%
		100%	100%	100%



7	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1. Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung PBJ	4 aplikasi/ konten	4 aplikasi/ konten	100%
8	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1. Persentase pelayanan informasi PBJP Masyarakat yang mengakses melalui web resmi LPSE Prov.Kalsel 2. Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
9	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 1. Persentase pelayanan administrasi tata usaha biro	100%	100%	100%
	2. Persentase SDM Pengelola PBJ yang berkompeten	66.67%	90.57%	90.57%
	3. Persentase UKPBJ Prov, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal lev.3	30%	54.55%	54.55%
	4. Persentase terpenuhinya layanan permasalahan PBJ	100%	100%	100%
10	Tata Usaha Pengadaan Barang danJasa 1. Persentase Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset dan umum	100%	100%	100%
11	Pembinaan Kelembagaan dan SDM PengadaanBarang dan Jasa 1. Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ prov/kab/kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif) 2. Persentase SDM ASN selaku Pengelola PBJ yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya 3. Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan PBJ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	60%	81.82%	81.82%
		80%	84.91%	84.91%
		100%	100%	100%
12	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis 1. Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan 2. Persentase peserta bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan minimal 80 (baik)	100%	100%	100%
		65%	68%	68%
	Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	6 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6 dok	6 dok	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	240 stell	248 stell	103.33%
	Administrasi Perangkat Daerah			
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dok	12 dok	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43 unit	43 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%



Tabel 2.0
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Penanggung Jawab	Indikator	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
Eselon II Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
	2. Predikat indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	75 (baik)	85 (baik)	90.21	93.75
	3. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	87 (sangat memuaskan)	87 (sangat memuaskan)	99.83	99.70
	4. Jumlah inovasi pelayanan publik pengadaan barang dan jasa	3 Inovasi	4 Inovasi	3 Inovasi	4 Inovasi
ESELON III Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	100%	100%	100%	100%
	3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25%	25%	59.91	69.98
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Persentase paket PBJ perangkat daerah yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil riset analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	3. Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi PBJ	100%	100%	100%	100%
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD 2. Persentase pengelolaan katalog lokal	100%	100%	100%	100%
		50%	55%	50%	55%
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG & JASA	1. Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan PBJ sesuai aturan	100%	100%	82.20%	93.88%
	2. Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan	100%	100%	93.87%	93.51%
ESELON III KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	1. Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	0.8	0.8	0.8	0.8
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	1. Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput serta diumumkan pada SiRUP tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	2. Paket pekerjaan PBJ yang telah dilaksanakan secara elektronik	-	-	-	-
	3. Jumlah penyedia yang teregistrasi dan terverifikasi	-	-	-	-
	4. Persentase laporan/gangguan terhadap sistem pengadaan secara elektronik	-	-	-	-



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	5. Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/Unit kerja/Penyedia/Pokja di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	100%	100%	100.10%	100%
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	1. Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	3 aplikasi /konten	4 aplikasi /konten	3 aplikasi /konten	4 aplikasi /konten
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Persentase peningkatan pengguna/pemakai yang mengakses informasi pada website resmi LPSE Prov.Kalsel 2. Persentase dokumentasi data dan informasi barang dan jasa hasil pengadaan	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%
ESELON III KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Persentase pelayanan administrasi tata usaha biro	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase SDM Pengelola PBJ yang berkompeten	57.14%	66.67%	97.56%	90.57%
	3. Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi, Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3	18.18%	30%	45.45%	54.55%
	4. Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1. Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset dan umum	100%	100%	100%	100%
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN SDM dan KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Prov/Kab/Kota yang ditindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif) 2. Persentase SDM ASN selaku Pengelola PBJ yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten di bidangnya 3. Persentase pelaksanaan pembinaan	40%	60%	45.45%	81.82%
		70%	80%	97.56%	84.91%
		100%	100%	100%	100%



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	kelembagaan PBJ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota				
ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Persentase jumlah perangkat daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase peserta bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses pbj dengan minimal 80 (baik)	60%	65%	60%	68%
	3. Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%



Untuk lebih Jelasnya Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per eselon tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Predikat indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	85	93.75	110.29	
2	Jumlah inovasi pelayanan publik PBJ yang diterapkan	Jumlah Inovasi	4	4	100	
3	Nilai indeks kepuasan pengguna layanan PBJ	Point	87	99.70	114.59	

Rumus Perhitungan :

- 1. Hasil Penilaian LKPP**
- 2. Inovasi pelayanan publik yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
- 3. Nilai indeks kepuasan penggunaan layanan PBJ dari aplikasi e-tamu**

Tabel 2.2

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Proses PBJ Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	Persen	100	100	100	
2	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	Persen	100	100	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	25	69.98%	100	

Rumus Perhitungan :

- 1. Jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu / Jumlah permohonan proses pengadaan barang dan jasa x 100%**



2. Jumlah paket tender yang direview dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa / Jumlah keseluruhan paket tender yang masuk ke pengadaan barang dan jasa x 100%
3. Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/total belanja langsung x 100%

Tabel 2.3

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	
2	Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan.	Rasio	0,8	0,8	100	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan / jumlah pemenuhan layanan LPSE x 100%
2. Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan

Tabel 2.4

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PEMBINAAN & ADVOKASI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	%Capaian	
1	Persentase pelayanan administrasi tata usaha biro	Persen	100	100	100	
2	Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3	Persen	30	54.55	181.52	
3	Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	66.67	90.57	135.84	
4	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100	100	



Rumus Perhitungan :

1. Realisasi dokumen administrasi tata usaha / jumlah dokumen pelaksanaan administrasi tata usaha x 100%
2. JUMLAH ASN YANG AKAN IKUT DIKLAT/PELATIHAN/BIMTEK PBJ / JUMLAH ASN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT x 100%
3. Jumlah UKPBJ yang akan mencapai level kematangan UKPBJ pada level 3 / jumlah UKPBJ yang belum mencapai level 3 x 100%
4. Permasalahan pengadaan barang dan jasa yg diselesaikan / total permasalahan PBJ yang diterima x 100%

Tabel 2.5

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase paket PBJ perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	100	100	
2.	Persentase hasil riset Analisa pasar yang dapat digunakan oleh pengguna PBJ	Persen	100	100	100	
3.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan strategi PBJ	Persen	100	100	100	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah paket pengadaan yang telah sesuai / jumlah paket keseluruhan x 100%
2. jumlah SKPD yang menggunakan hasil riset analisa pasar / jumlah keseluruhan SKPD x 100%
3. Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Strategi PBJ / total seluruh perangkat daerah x 100%



Tabel 2.6

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase hasil pemilihan penyedia yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan dimanfaatkan oleh SKPD	Persen	100	100	100	
2	Persentase pengelolaan kataloh lokal	Persen	55	55	100	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah SKPD yang setuju atau menerima hasil pemilihan penyedia / jumlah SKPD x 100%
2. Jumlah produk yang tayang dietalase / jumlah usulan produk SKPD atau penyedia x 100%

Tabel 2.7

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang menyampaikan laporan PBJ sesuai aturan	Persen	100	93.88	93.88	*Masih adanya SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang dan jasa tepat waktu karena belum ada aturan yang mewajibkan SKPD untuk melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa
2	Persentase paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan	Persen	100	93.51	93.51	*Masih ada SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan usulan tendernya sesuai aturan

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah Perangkat Daerah dan UPT yang menyampaikan laporan PBJ sesuai aturan / Jumlah Perangkat Daerah dan UPT x 100%
2. Jumlah paket tender yang proses perencanaan dan pelaksanaan PBJ sesuai aturan / total keseluruhan paket tender x 100%

Tabel 2.8

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase SKPD yang Menyusun RUP dan terinput serta diumumkan pada SIRUP tepat waktu	Persen	100	100	100	
2	Persentase layanan konsultasi/pendampingan kepada SKPD/Unit Kerja/Penyedia/Pokja di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Persen	100	100	100	

Rumus Perhitungan :

1. jumlah SKPD yang telah menginput RUP dan SIRUP secara tepat waktu / total SKPD x 100%
2. jumlah terlaksananya layanan konsultasi/pendampingan dalam penyelesaian sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik / total permintaan SKPD,Unit kerja lingkup Pemerintah Kalsel dalam layanan konsultasi, pendampingan yang diterima x 100%



Tabel 2.9

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	Aplikasi/ konten	4	4	100	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah aplikasi dan konten pendukung sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang sudah dikembangkan

Tabel 3.0

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase peningkatan pengguna/ pemakai yang mengakses informasi pada website resmi LPSE prov. Kalsel	Persen	100	100	100	
2	Persentase dokumentasi data dan informasi barang & jasa hasil pengadaan	Persen	100	100	100	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah pengunjung tahun N di kurang jumlah pengunjung N-1 / jumlah pengunjung N-1 x 100%
2. Jumlah realisasi pbj yang dilaksanakan secara elektronik / jumlah rencana pbj yang dilaksanakan secara elektronik x 100%



Tabel 3.1

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset dan umum	Persen	100	100	100	

Rumus Perhitungan :

1. Realisasi dokumen administrasi tata usaha / jumlah dokumen pelaksanaan administrasi tata usaha x 100%

Tabel 3.2

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN & SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase rekomendasi tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ Prov/Kab/Kota yang di tindaklanjuti untuk menjadi level 3 (proaktif)	Persen	60	81.82	136.37	
2	Persentase pelaksanaan pembinaan kelembagaan PBJ pemerintah provinsi, kab/kota	Persen	100	100	100	
3	Persentase SDM ASN selaku pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapatkan sertifikat dan berkompeten dibidangnya	Persen	80	84.91	106.14	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat / jumlah total keseluruhan SDM Biro PBJ x 100%
2. Jumlah Prov/Kab/Kota yang sudah tingkat kematangan level 3 / jumlah Kab/Kota x 100%
3. Jumlah pembinaan atau monitoring kelembagaan UKPBJ Kab/Kota sekalsel / jumlah Kab/Kota x 100%



Tabel 3.3

REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			KETERANGAN
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	
2	Persentase Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik)	Persen	65	68	105.62	
3	Persentase permasalahan sanggah dan aduan pelaksanaan PBJ yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	

Rumus Perhitungan :

1. Jumlah Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan proses PBJ sesuai ketentuan / jumlah Perangkat Daerah x 100%
2. umlah Peserta Bimbingan teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memahami proses PBJ dengan nilai minimal 80 (baik) /total seluruh peserta bimbingan teknis kegiatan PBJ x 100%
3. permasalahan sanggah dan aduan yang berhasil ditindaklanjuti / total permasalahan sanggah dan aduan yang diterima x 100%



Tingkat keberhasilan program/kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya kebutuhan dan kepercayaan stakeholder terhadap peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam usaha mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang berkualitas;
- Dukungan yang kuat dari pimpinan dan semua pegawai/SDM dalam merespon kepentingan daerah;
- Perencanaan dan penetapan target yang logis dan rasional.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Didalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak terlepas dari anggaran dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), pada tahun 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa memperoleh Pagu Murni sebesar Rp.8.182.200.500,- dan Pagu Perubahan sebesar Rp.8.262.197.100,-.

Dana yang digunakan untuk mengakomodir 2 Program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.046.695.439,- dengan realisasi keuangan 85.29% serta sisa anggaran sebesar Rp.1.215.501.261,- dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai penjelasan sebagai berikut :

- 1) Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Efisiensi dan Penghematan Anggaran Belanja untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah.
- 2) Efisiensi pada belanja perjalanan dinas luar daerah (untuk tiket pesawat dan hotel).
- 3) Efisiensi pada belanja dalam daerah (hotel dan transport)
- 4) Efisiensi pada belanja kontribusi mengikuti bimtek/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (biaya kontribusi dan perjalanan dinasnya)
- 5) Pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yaitu belanja jasa layanan internet dengan pagu anggaran sebesar Rp.802.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.481.733.890,- (60.01%) disebabkan karena ada Sebagian layanan internet yang pengelolaannya diambil alih Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga ada 2 item layanan internet yang hanya dibayar selama 3 bulan, dengan Sisa Anggaran sebesar Rp.321.066.110,- (39.91%), Dimana sisa anggaran ini sesuai arahan dari Dinas Kominfo dan BPKAD pada anggaran perubahan tidak diperbolehkan untuk dialihkan untuk kegiatan lain.

Secara keseluruhan penyerapan Realisasi Keuangan Tahun 2024 lebih rendah dari Pagu Anggaran / Batas Atas yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 2024, tetapi untuk Koefisien / **Realisasi Fisik pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sudah mencapai 100%**, dengan **Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.215.501.261,- (14,71%)** dari Pagu Anggaran yang merupakan hasil penghematan dan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan oleh sesuai arahan pimpinan dan prinsip-prinsip pengadaan.



2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Rincian Anggaran pada Biro Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Program Kegiatan dan Sasaran Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Rincian Anggaran berdasarkan sasaran pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp.6.220.459.400	Rp.5.411.240.782	86.99
	Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.1.345.159.600	Rp.1.172.415.976	87.16
	Optimalisasi Rencana Strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.531.734.800	Rp.460.154.163	86.54
	Terwujudnya pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu	Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa	Rp.474.041.800	Rp.423.186.474	89.27
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.339.383.000	Rp.289.075.339	85.18
	Meningkatnya Kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan	Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp.2.398.327.200	Rp.1.981.276.473	82.61
	Terselenggaranya jasa layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp.880.737.400	Rp.729.475.695	82.83
	Optimalisasi pengembangan sistem informasi pendukung pengadaan barang dan jasa	Pengembangan SistemInformasi	Rp.675.652.000	Rp.553.302.259	81.89



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	Optimalisasi penyebaran informasi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang Jasa	Rp.841.937.800	Rp.698.498.519	82.96
	Meningkatnya Kualitas SDM Pengadaan barang dan jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.2.476.972.600	Rp.2.257.548.333	91.14
	Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ di Provinsi Kalimantan Selatan				
	Meningkatnya kualitas layanan konsultasi Pendampingan dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa				
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.817.056.000	Rp.749.935.764	91.79
	Optimalisasi pembinaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.605.988.600	Rp.528.043.562	87.14
	Terlaksananya pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis proses pengadaan barang dan jasa	Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.1.053.928.000	Rp.979.569.007	92.94
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.2.086.330.800	Rp.1.635.454.657	78.39
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.7.129.800	Rp.6.735.800	94.47
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.34.462.000	Rp.31.097.200	90.24
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp.95.892.000	Rp.95.516.000	99.61



Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2024

	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Administrasi umum perangkat daerah	Rp.625.221.900	Rp.575.800.767	92.10
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp.476.232.000	Rp.444.571.000	93.35
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp.802.800.000	Rp.481.733.890	60.01
TOTAL			Rp.8.262.197.100	Rp.7.046.695.439	85.29%



3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan terhadap penurunan dan kenaikan jumlah Program dan Kegiatan pada tahun berjalan dan pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Rincian jumlah Program dan Jumlah Kegiatan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya

2023		2024	
Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat daerah		Administrasi Umum Perangkat daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



	Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik		Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	2 Program 9 Kegiatan		2 Program 9 Kegiatan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengurangan atau penambahan jumlah kegiatan dan sub kegiatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu pada tahun 2023 terdapat 2 program dan 9 kegiatan 16 sub kegiatan, sedangkan pada tahun 2024 hanya berjumlah 2 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki kemampuan yang handal sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 52 orang pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan dan golongan/ruang.

- Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah terbanyak dari S1 sebanyak 36 orang atau 69.23%
- Berdasarkan Jabatan, Jabatan Struktural terdapat 12 orang atau 23.07%
- Pejabat Fungsional Tertentu (Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) terdapat 31 orang atau 59,62%
- Berdasarkan Golongan, jumlah pegawai terbanyak pada golongan III sebanyak 31 orang atau 59.62%

Pada Kepegawaian Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih kurang/belum memadai dalam mendukung tugas-tugas pekerjaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran startegis, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan program yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan 2 (Dua) Program.

Dapat dilihat pada Tabel 4.9 dibawah ini tentang Program Biro Pengadaan Barang dan Jasa :



Tabel 3.6
Program Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Program	Kegiatan Teknis
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa - Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 2. Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik - Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik - Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa - Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa 3. Pembinaan dan Advokasi PengadaanBarang dan Jasa - Pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa - Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa - Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa mendapat anggaran dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dana yang digunakan mengakodir 2 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan yaitu Pagu Murni sebesar Rp.8.182.200.500,- dan Pagu Perubahan sebesar Rp.8.262.197.100,- dengan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.046.695.439,- dengan realisasi



keuangan 85.29% sisa anggaran sebesar Rp.1.215.501.261 Realisasi keuangan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai penjelasan sebagai berikut :

- 1) Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Efisiensi dan Penghematan Anggaran Belanja untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah.
- 2) Efisiensi pada belanja perjalanan dinas luar daerah (untuk tiket pesawat dan hotel).
- 3) Efisiensi pada belanja dalam daerah (hotel dan transport)
- 4) Efisiensi pada belanja kontribusi mengikuti bimtek/pelatihan peningkatan kompetensi SDM (biaya kontribusi dan perjalanan dinasnya)
- 5) Pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yaitu belanja jasa layanan internet dengan pagu anggaran sebesar Rp.802.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.481.733.890,- (60.01%) disebabkan karena ada Sebagian layanan internet yang pengelolaannya diambil alih Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga ada 2 item layanan internet yang hanya dibayar selama 3 bulan, dengan Sisa Anggaran sebesar Rp.321.066.110,- (39.91%), Dimana sisa anggaran ini sesuai arahan dari Dinas Kominfo dan BPKAD pada anggaran perubahan tidak diperbolehkan untuk dialihkan untuk kegiatan lain.

Secara keseluruhan penyerapan Realisasi Keuangan Tahun 2024 lebih rendah dari Pagu Anggaran / Batas Atas yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 2024, tetapi untuk Koefisien / **Realisasi Fisik pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sudah mencapai 100%**, dengan **Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.215.501.261,- (14,71%)** dari Pagu Anggaran yang merupakan hasil penghematan dan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan oleh sesuai arahan pimpinan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Jadi untuk realisasi fisik untuk seluruh program dan kegiatan 100%. Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan rata- rata capaian kinerja 108.29%

Capaian Target Kinerja yang diungkapkan dalam LAKIP ini dipengaruhi faktor baik intern maupun ekstern di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun secara keseluruhan pencapaian kegiatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

Tingkat pencapaian kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya kebutuhan dan kepercayaan stakeholder terhadap peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam usaha mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang berkualitas;
- Dukungan yang kuat dari pimpinan dan semua pegawai/SDM dalam merespon kepentingan daerah;
- Perencanaan dan penetapan target yang logis dan rasional.



B. Strategi Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Melakukan koordinasi lebih lanjut kepada masing-masing Bagian dan Sub Bagian atas program/kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya agar dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan ;
- Meningkatkan kemampuan tenaga/SDM PNS Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara mengikut sertakan dalam setiap Diklat/Bimtek yang akan menunjang kinerja untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan organisasi;
- Diharapkan pada tahun yang akan datang kegiatan yang memerlukan waktu pelaksanaan yang panjang agar dapat dilaksanakan pada awal tahun/triwulan pertama.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini yang merupakan pertanggungjawaban kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk mempertanggung jawabkan atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan, serta mengukur tingkat keberhasilan kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah.



LAMPIRAN